

## ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki bermacam-macam peraturan hukum, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan untuk mengatur berbagai macam tindak pidana. Adapun jenis tindak pidana yang sekarang ini sedang terjadi di negara Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Masalah hukum pidana sangat kompleks sehingga sulit bagi orang awam untuk mengerti dan memilah-milah pasal-pasal yang mengatur suatu kasus hukum hal ini sering membingungkan bagi orang awam saat terlibat dalam suatu kasus hukum sehingga perlu ada sebuah program komputer untuk membantu memahami dan memilah-milah pasal-pasal yang terlibat dalam suatu kasus hukum khususnya kum tindak pidana korupsi.

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *waterfall* yang hanya meliputi tahap perencanaan, analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, *programming*, dan tahap pengujian. Pengembangan sistem ini pakar ini menggunakan metode *forward chaining*, yaitu proses inferensi yang memulai pencarian dari premis atau data menuju konklusi. Materi hukum untuk program sistem pakar ini diadopsi dari UU No.20 Tahun 2001 (tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi). Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai media penyimpanan data, dan Dreamweaver adalah *software* yang digunakan sebagai *tool* untuk membangun sistem pakar berbasis web ini.

Tujuan dari *software* ini adalah membuat sistem pakar yang digunakan untuk menyeleksi pasal-pasal KUHP yang terlibat dalam suatu kasus pidana. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa tampilan *user interface* cukup menarik, bahasa yang digunakan dalam tampilan *user interface* baik, kemudahan dalam penggunaan program dinilai baik, keakuratan data-data dalam program baik, keakuratan hasil yang dihasilkan oleh program cukup dan kelayakan program dinilai baik dan masih membutuhkan pengembangan pada sisi materi hukumnya dengan pengembangan program sejenis dengan domain permasalahan hukum yang lebih luas.